

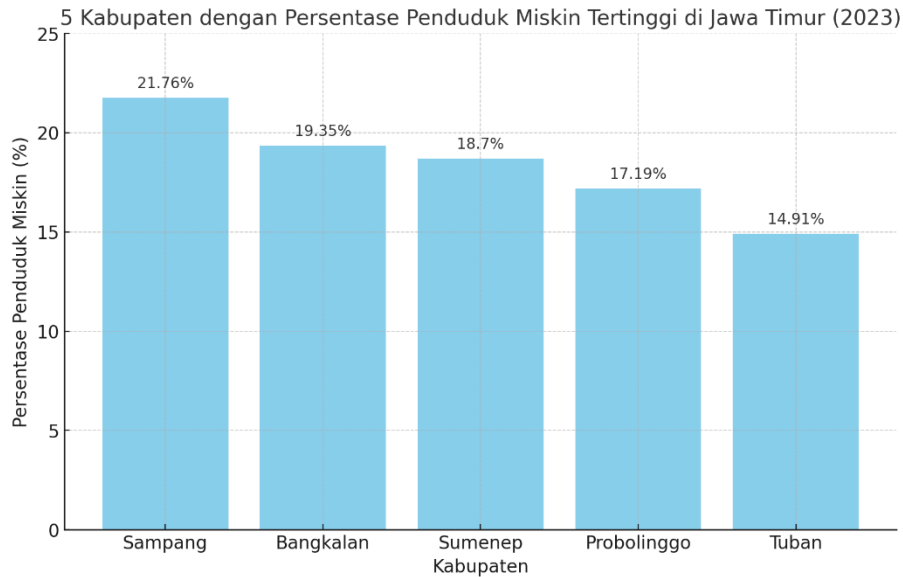
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan, adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Syafiq, 2020).

Menurut para ahli ekonomi (Arsyad, 2010) kemiskinan di Indonesia adalah bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain adalah aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang maksimal, dan tingkat pendidikan yang rendah. (Wijayanti, 2005).



Gambar 1. 1 5 Kabupaten Termiskin di Jawa Timur

Sumber: bps.go.id, Tahun 2023

Lima kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023. Data ini sangat penting dalam memahami kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kabupaten-kabupaten yang masuk dalam lima besar tersebut adalah Sampang (21,76%), Bangkalan (19,35%), Sumenep (18,70%), Probolinggo (17,19%), dan Tuban (14,91%). Angka-angka tersebut mencerminkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yakni mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik dari segi makanan maupun non-makanan seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

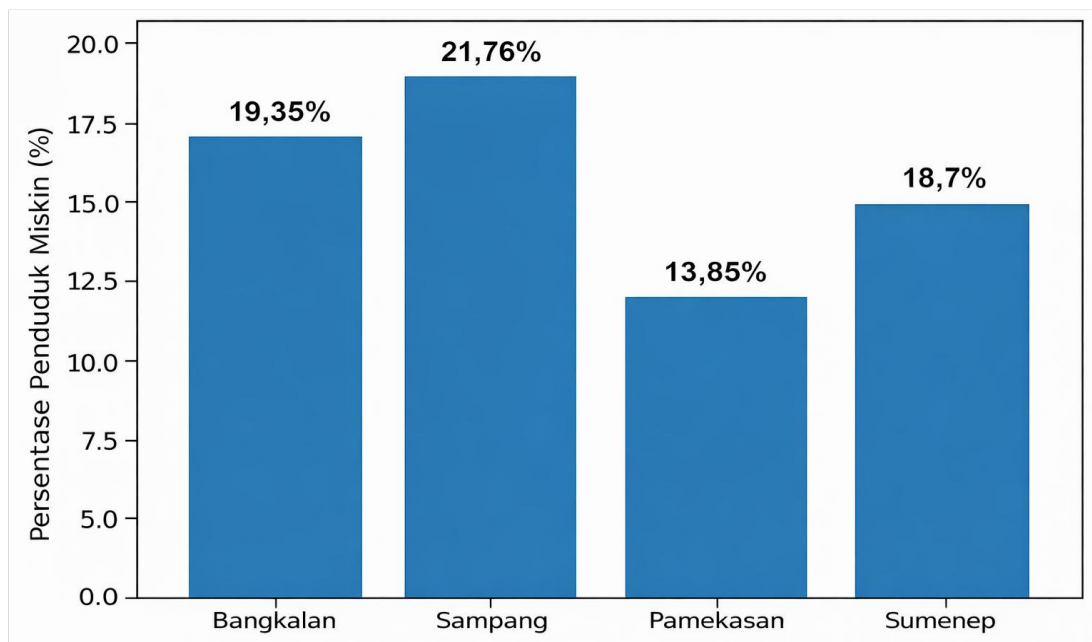
Dari lima kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi berada di Pulau Madura, yaitu Sampang, Bangkalan, dan Sumenep. Wilayah Madura memang telah lama menghadapi tantangan pembangunan, termasuk terbatasnya akses infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, minimnya industri, dan ketergantungan pada sektor

pertanian tradisional. Semua faktor ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. Sementara itu, Kabupaten Probolinggo dan Tuban yang tidak berada di Madura juga menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ketimpangan distribusi hasil pembangunan, keterbatasan akses industri, dan ketergantungan pada sektor informal seperti pertanian dan nelayan tradisional yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga pasar.

Penggunaan persentase dalam mengukur kemiskinan penting karena memberikan gambaran yang lebih proporsional. Sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk kecil bisa memiliki angka kemiskinan yang tinggi meskipun jumlah absolut orang miskinnya rendah. Sebaliknya, kota besar seperti Surabaya bisa memiliki angka kemiskinan absolut tinggi tetapi persentasenya kecil karena jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, angka persentase lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan relatif di suatu wilayah.

Berdasarkan data ini, pemerintah daerah maupun pusat dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain pengembangan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM lokal. Diversifikasi ekonomi lokal juga penting agar tidak bergantung pada sektor pertanian tradisional yang rawan risiko. Selain itu, perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi, dan jaminan kesehatan harus diperkuat dan disalurkan secara efisien.

Kemiskinan adalah persoalan struktural yang tidak bisa diatasi hanya dengan intervensi jangka pendek. Diperlukan pendekatan jangka panjang yang terintegrasi dan berbasis data untuk benar-benar mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memahami siapa yang miskin, di mana mereka berada, dan apa penyebabnya, maka solusi yang ditawarkan akan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.



Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan per Kabupaten di Pulau Madura

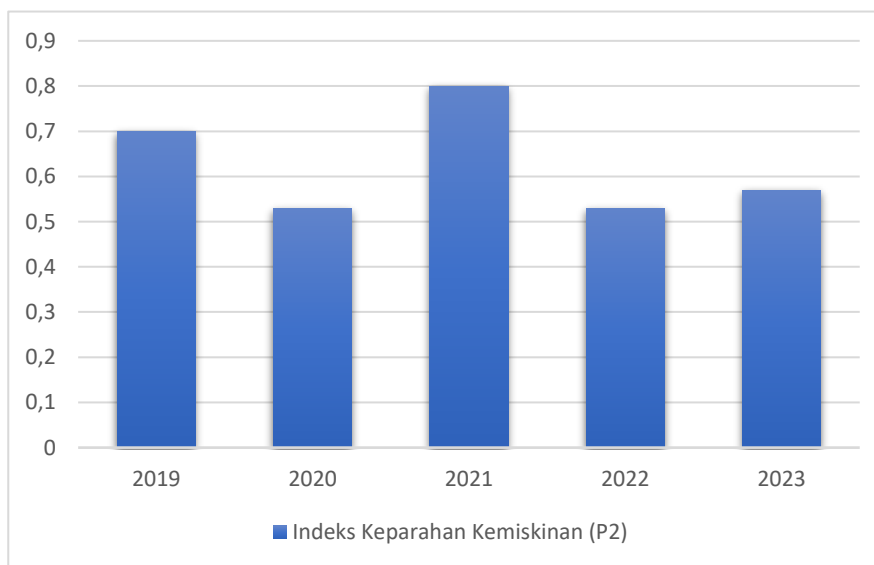
Sumber : Kominfo Jawa Timur, Tahun 2023

Kabupaten Sampang saat ini merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Madura, diikuti oleh Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini. Untuk di Provinsi Jawa Timur Sampang juga merupakan kabupaten termiskin tertinggi. Kabupaten Sampang menjadi kabupaten termiskin di Pulau Madura karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional yang kurang produktif, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat pendidikan yang belum merata, terbatasnya infrastruktur dasar, serta minimnya investasi dan lapangan kerja menjadi penyebab utama. Selain itu, hambatan sosial seperti tingginya angka pernikahan dini dan budaya

merantau juga memperparah kondisi ekonomi daerah. Kurangnya pemerataan pembangunan antara daerah pesisir dan perkotaan semakin memperkuat ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sampang.

Gambar 1. 3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2023

Sumber : Bps.go.id, Tahun 2023



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang pada bulan Maret 2021 sebesar 237,23 ribu. Jumlah ini bertambah sebesar 12,49 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 224,74 ribu jiwa. orang, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang juga mengalami peningkatan dari 22,78 persen pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 23,76 persen pada bulan Maret 2021 (BPS, 2023).

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sampang pada bulan Maret 2021 sebesar Rp391.032,00 perkapita perbulan, bertambah sebesar Rp16.124,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,30 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp374.908,00. Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Sampang memiliki 4,54 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga

miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.775.285,28 per rumah tangga miskin. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sampang Maret 2021 sebesar 0,804, mengalami peningkatan sebesar 0,272 poin dibandingkan Maret 2020 yaitu 0,532 (BPS, 2023).

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2020-Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 12,49 persen, yaitu dari Rp.224,74 ribu jiwa pada bulan 2020 menjadi 237,223 ribu jiwa pada Maret 2021 dan mengalami peningkatan 5,56 persen. Berdasarkan presentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang dalam rentang 1 tahun, mengalami peningkatan 4,30 persen, dari 22,78 persen pada 2020 menjadi 23,76 persen pada Maret 2021 (BPS, 2023).

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 82,00 persen berbanding 18,00 persen.

Perubahan harga yang terjadi pada kelompok makanan tentunya akan sangat berpengaruh pada garis kemiskinan, dan yang paling terkena imbasnya adalah masyarakat perkotaan yang notabene kebutuhan makanannya diperoleh dengan cara membeli. Jika pendapatan mereka konstan atau peningkatannya tidak dapat mengikuti naiknya harga barang (inflasi), maka besar kemungkinan akan menambah jumlah penduduk miskin. Berbeda dengan masyarakat di perdesaan, perubahan harga barang makanan tidak begitu berpengaruh pada mereka, karena bahan makanannya kebanyakan diproduksi sendiri. Sehingga jika harga bahan makanan naik, mereka tidak serta merta menjadi miskin. Hal ini menjadi penyebab persentase maupun jumlah penduduk miskin Kabupaten Sampang meningkat, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menurun. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang telah dilakukan oleh situs badan pusat statistik BPS, bahwa dalam 3 tahun terakhir kemiskinan di Kabupaten Sampang terus meningkat (Bhagaskara, 2023).

Salah satu kewajiban umat sebagai seorang muslim selain shalat dan membaca Al-Qur'an adalah zakat. Kewajiban umat muslim atas zakat telah ditegaskan dalam Al Qur'an berulang kali dalam berbagai surat. Seperti pada surat Al Baqarah ayat 43 yang menyerukan umat untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Dari ayat tersebut sangat jelas makna yang terkandung agar seluruh umat Allah SWT melaksanakan perintah zakat. Tak hanya zakat, infaq dan shodaqoh pun juga diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan (Sunarsa, 2023).

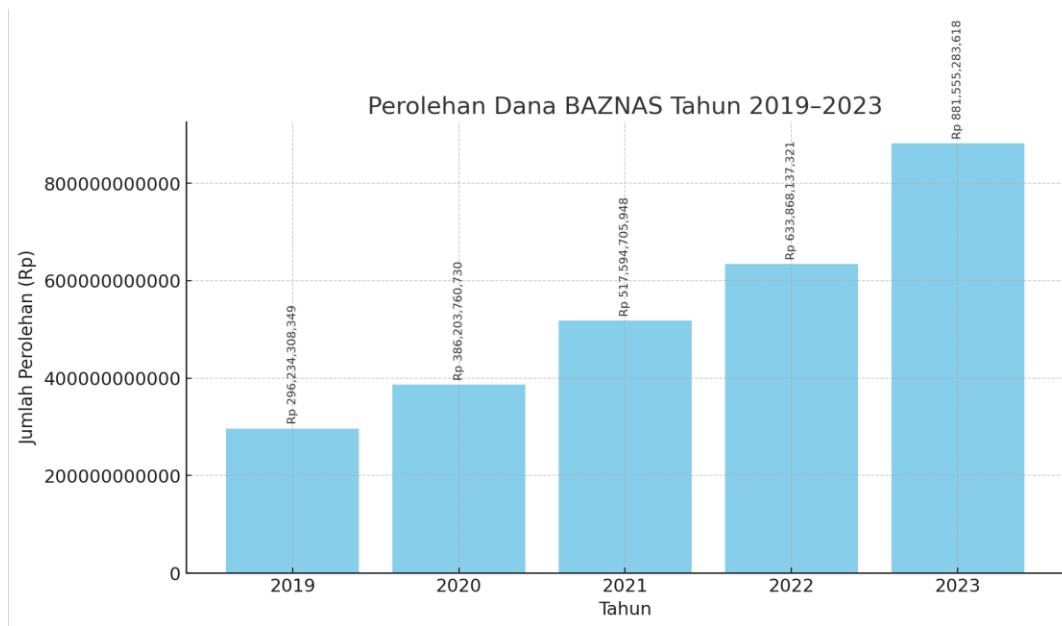
Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) merupakan tanggung jawab bagi suatu negara yang mayoritas muslim. Karena ZIS merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. Dalam perannya untuk memberdayakan ekonomi umat, tentunya penghimpunan ZIS tidak lepas dari sebuah badan yang menaungi dan mengelola seluruh penghimpunan dan pendistribusian ZIS (Kasno, 2023).

Menurut Sudewo (2011), keberadaan badan yang menaungi zakat diperlukan untuk memberikan peran yang signifikan dengan menunjukkan kinerja, komitmen, integritas dan kepercayaan dalam manajemen pelaksanaan zakat. Untuk itu pemerintah membentuk sebuah badan pengelola zakat untuk memudahkan menghimpun dan menyalurkan zakat yang ada di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Ma'mun, 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Sebagaimana data yang dilansir oleh BAZNAS, zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mengingat hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. BAZNAS dapat menghimpun ZIS nasional sebesar Rp 3,2 triliun. Sedangkan untuk tahun ini, Kementerian Agama menargetkan BAZNAS untuk menghimpun ZIS nasional sebesar Rp 4,2 triliun. Tentunya angka tersebut masih terbilang sangat kecil dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang mencapai 217 triliun tiap tahunnya (ppid.baznas.go.id 2010).

BAZNAS diantaranya adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. BAZNAS provinsi melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada ementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bab IV, pasal 32)

Dengan adanya BAZNAS, Zakat, Infak/Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya bisa dikelola dengan baik dan bijak. Pengumpulan zakat yang dihimpun oleh BAZNAS meningkat dari tahun ke tahun berikut data hasil pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.



Gambar 1. 4 Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan di Provinsi Jawa Timur 2019-2023

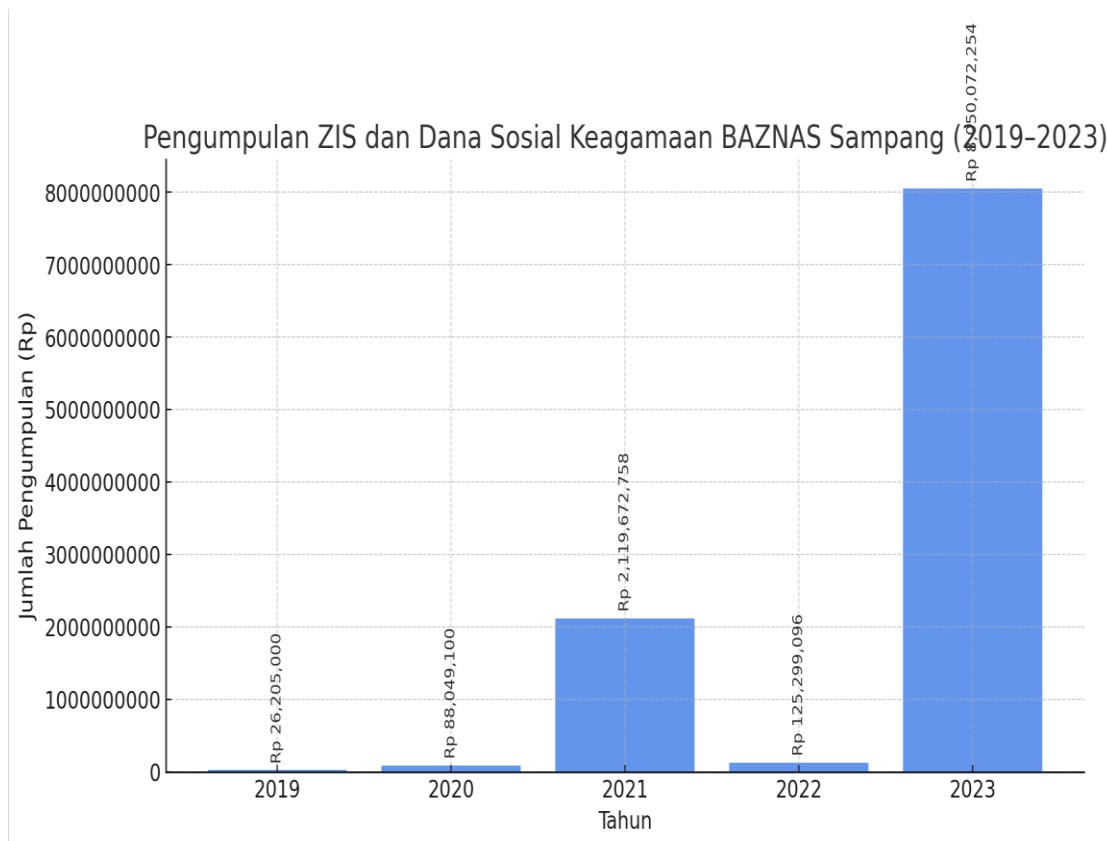
Sumber : ppid.baznas.go.id 2019-2023

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 BAZNAS mencapai Rp 296,234,308,349; pada tahun 2020 BAZNAS mencapai Rp 386,203,760,730; pada tahun 2021 BAZNAS mencapai Rp 517,594,705,948; pada tahun 2022 BAZNAS mencapai Rp 633,868,137,321; pada tahun 2023 BAZNAS mencapai Rp 881,555,283,618 (ppid.baznas.go.id 2019-2023).

BAZNAS melakukan berbagai upaya untuk berintegrasi dengan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu terbentuklah BAZNAS Provinsi yang memiliki tanggung jawab terhadap pusat. Selanjutnya BAZNAS kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab terhadap BAZNAS provinsi. Salah satu BAZNAS kabupaten/kota yang baru saja didirikan secara resmi dan sudah genap 4 tahun pendirian adalah BAZNAS Kabupaten Sampang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang, adalah Lembaga Pengumpul Zakat Kabupaten Sampang yang mempunyai amanah sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Zakat, Infaq

dan Shadaqah. Sekretariat Baznas terletak di Pusat Kota Kabupaten Sampang, yaitu di Jalan Bahagia, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang.

Di Kabupaten Sampang sendiri, implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dimulai dari pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan pembubaran BAZIS dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sampang nomor 188/130/KEP/434.013/2009 tertanggal 30 Maret 2009, maka Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Sampang dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan BAZ di Kabupaten Sampang masih berada di bawah naungan Dinas Kementrian Agama. Tanggal 16 Jumadil Awal 1440 H/22 Januari 2019 M, Bupati Sampang mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/71/KEP/343/2019 tanggal 25 Januari 2019 untuk mengangkat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sampang Periode Tahun 2019- 2024 dan dilantik pada Tanggal 27 Januari 2019. Mandat yang diberikan kepada BAZNAS untuk berperan sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional menjadi momentum Era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah swt. semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.



Gambar 1. 5 Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Kabupaten Sampang 2019-2023

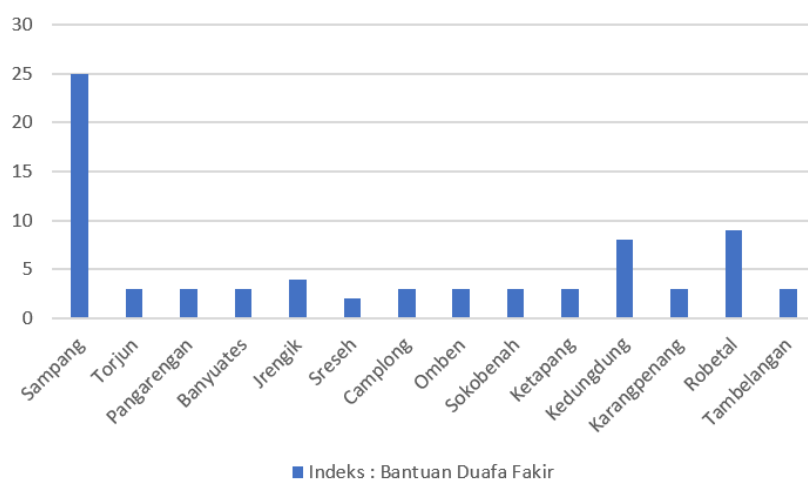
Sumber : kabsampang.baznas.go.id

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan di kabupaten sampang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 BAZNAS mencapai Rp Rp26.205.000; pada tahun 2020 BAZNAS mencapai Rp Rp88.049.100; pada tahun 2021 BAZNAS mencapai Rp Rp2.119.672.758; pada tahun 2022 BAZNAS mencapai Rp Rp125.299.096; pada tahun 2023 BAZNAS mencapai Rp8.050.072.254 (ppid.baznas.go.id 2019-2023)

Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di

dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (Maulana *et al*, 2023)

Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah Az-Zuhaili diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam kasus pengentasan kemiskinan (Hidayat, 2023)



Gambar 1.5 Penerima Bantuan Kaum Duafa Fakir Perkecamatan di Kabupaten Sampang

Sumber: baznassampang

Grafik batang tersebut menggambarkan Indeks Bantuan Duafa Fakir di berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang. Indeks ini menunjukkan seberapa besar distribusi bantuan yang diberikan kepada masyarakat duafa dan fakir miskin di tiap kecamatan. Dari grafik terlihat bahwa Kecamatan Sampang memiliki indeks tertinggi, jauh melampaui kecamatan lain dengan angka sekitar 25. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan di wilayah ini sangat dominan, kemungkinan karena jumlah penduduk miskin yang tinggi, konsentrasi program sosial yang berpusat di ibu kota kabupaten, serta akses yang lebih mudah terhadap lembaga sosial

seperti BAZNAS dan dinas terkait. Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya seperti Torjun, Pangarengan, Banyuates, Jrenjeng, Sreseh, Camplong, dan Omben menunjukkan angka indeks yang jauh lebih rendah, berkisar antara 1 hingga 5. Hanya beberapa kecamatan seperti Karang Penang dan Robetal yang memiliki indeks mendekati 9 hingga 10, menandakan penyaluran bantuan yang relatif lebih aktif di sana.

Perbedaan angka ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan antar wilayah. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh keterbatasan data, kurangnya koordinasi, atau rendahnya jangkauan program di wilayah-wilayah tertentu. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS perlu memperluas jangkauan program dan melakukan pendataan ulang terhadap kelompok mustahik, terutama di kecamatan dengan indeks rendah. Diperlukan pula peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lebih merata dan adil. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting dilakukan agar program sosial benar-benar tepat sasaran dan menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang harus dipecahkan. Seperti data yang telah ada bahwa kemiskinan Kabupaten Sampang semakin bertambah dari tahun ke tahun sehingga penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara khususnya kabupaten Sampang mampu menikmati kehidupan yang bermartabat.

Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Upaya mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pengentasan Kemiskinan juga telah diupayakan melalui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan

rakyat. Namun upaya pemerintah ini tidak bisa terlaksana dengan sempurna karena terdapat banyak sekali kendala. Sehingga disini BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat seyogianya berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan (Isrowiyah, 2021).

Program penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ untuk membantu pengentasan kemiskinan terbagi menjadi dua skema, yaitu program yang bersifat karikatif (konsumtif) dan program yang bersifat produktif. Meskipun terdapat berbagai program penyaluran zakat yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan, akan tetapi belum ada alat ukur yang menjadi standar untuk mengetahui cara penghitungan dampak program yang telah dilakukan secara keseluruhan. Kajian instrumen pengukuran penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini diperlukan sebagai metode pengukuran bagi BAZNAS dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas program-programnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan (Oktavia, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Penelitian oleh Zahira et al. (2024) menunjukkan bahwa BAZNAS di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalankan perannya dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Namun, efektivitas pelaksanaan program-program tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi kepada masyarakat dan transparansi pelaporan yang belum optimal.

Senada dengan temuan tersebut, Hidayat et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Makassar memiliki kontribusi nyata dalam membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu melalui program pembinaan keagamaan, pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial lainnya. Akan tetapi, penelitian ini juga mencatat adanya kendala dalam pengelolaan internal

lembaga, terutama terkait dengan kurangnya sosialisasi program dan belum maksimalnya keterbukaan informasi publik.

Sejauh ini, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa BAZNAS berperan dalam mengurangi kemiskinan di berbagai daerah. Peran itu biasanya dilakukan melalui program bantuan zakat, pelatihan usaha, dan kegiatan sosial lainnya. Namun, masih ada beberapa masalah yang sering muncul, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta kurangnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam program-program BAZNAS.

Selain itu, kebanyakan penelitian dilakukan di daerah perkotaan atau wilayah yang secara kelembagaan sudah cukup kuat. Belum banyak kajian yang membahas bagaimana BAZNAS berperan di daerah seperti Kabupaten Sampang, yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur dan di pulau Madura.

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana peran BAZNAS di Kabupaten Sampang dalam mengatasi kemiskinan. Untuk itu, penulis menggunakan teori agency. Dalam konteks ini, BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam menanggulangi kemiskinan. Sebagai lembaga yang dipercayai oleh muzakki, BAZNAS diharapkan mampu menjalankan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara tepat sasaran. Dengan menjalankan peran tersebut sesuai dengan harapan masyarakat, BAZNAS tidak hanya memenuhi kewajibannya sebagai pengelola dana zakat, tetapi juga berkontribusi dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, BAZNAS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan status dan fungsi sosial yang dimilikinya. Hal ini bertujuan agar kita dapat memahami lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab BAZNAS serta bagaimana lembaga ini menjalankan fungsinya di lapangan.

Topik tentang zakat ataupun Badan Amil Zakat (baik bentukan negara ataupun swasta) sudah sangat sering dikaji. Namun belum menyentuh pada pembahasan peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dalam skala nasional maupun wilayah kedaerahan. Adapun peran yang

dipaparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya, hanya bersifat penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan BAZNAS kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian. Harapan penulis pada kajian ini adalah mengetahui peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setidaknya, pada hasil akhir, kita dapat mengetahui apakah BAZNAS berperan mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sampang, atau justru tidak berperan. Di samping itu, harapan lain dari penulis adalah mendapatkan solusi jitu dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Sampang. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam menanggulangi kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana efektivitas program-program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program-program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini tentunya sangat berguna bagi penulis sebagai media pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan baik secara teori maupun Ekonomi Syariah sesuai dengan disiplin ilmu yang telah penulis tekuni.
- b. Untuk mendapatkan informasi mengenai aktifitas-aktifitas Badan Amil Zakat Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui usaha dan bentuk pengelolaan zakat di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Baznas dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.